

# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

2018







# PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

# 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

## **PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN**

### **PROVINSI SULAWESI UTARA**

**2018**

No ISSN	2598-2621:
No Publikasi	: 71520.1904
Katalog BPS	: 3205011.71
Ukuran Buku	: A4
Jumlah Halaman	: vi + 31
Naskah	: Seksi Ketahanan Sosial
Gambar Kulit	: Seksi Ketahanan Sosial
Diterbitkan Oleh	: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Dicetak Oleh	:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

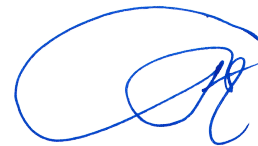
## KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Setiap tahun, BPS Provinsi Sulawesi Utara berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2018”.

Publikasi ini merupakan publikasi kelima tentang kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yang diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada periode 2016- 2018. Selain konsep definisi dan metodologi penghitungan penduduk miskin, juga menyajikan angka kemiskinan di Sulawesi Utara, perbandingan secara nasional serta karakteristik rumah tangga miskin. Data dan analisis yang disajikan dalam publikasi ini kondisi Bulan Maret dan September selama periode waktu 2016 – 2018.

Kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Manado, April 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Utara



Ateng Hartono

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Dan Data Yang Digunakan .....	1
1.3 Sistematika Penulisan .....	2
BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN .....	3
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan .....	3
2.2 Indikator Kemiskinan .....	7
2.3 Distribusi Dan Ketimpangan Pendapatan .....	8
BAB III PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA .....	13
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara, 2016-2018.....	13
3.2 Perkembangan Garis Kemiskinan .....	15
3.3 Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan .....	17
3.4 Distribusi Dan Ketimpangan Pengeluaran .....	19
BAB IV PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA NASIONAL .....	20
BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN SULAWESI UTARA.....	23
5.1 Karakteristik Demografi .....	23
5.2 Karakteristik Pendidikan .....	24
5.3 Karakteristik Perumahan .....	25
5.4 Karakteristik Ketenagakerjaan .....	27
5.5 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan .....	28
BAB VI LAMPIRAN .....	30

## DAFTAR TABEL

Table 1. Garis Kemiskinan Makanan Dan Non Makanan Sulawesi Utara, September 2017-September 2018 .....	16
Tabel 2. Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga di Sulawesi Utara, 2017-2018 .....	23
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Miskin yang dikepalai oleh Perempuan di Sulawesi Utara, 2017-2018 .....	24
Tabel 4. Kondisi Kemiskinan di Sulawesi Utara, Maret 2016-September 2018.....	30
Tabel 5. Gini Ratio Sulawesi Utara, 2018 .....	30
Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Umur 15+ Menurut Ijazah, 2018 .....	30
Table 7. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Umur 15+ Menurut Sektor Pekerjaan, 2018.....	30
Tabel 8. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2016-2018.....	31
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Miskin Sulawesi Utara Menurut Keberadaan Fasilitas BAB, 2016-2018.....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2016-2018 .....	13
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2016-2018.....	14
Gambar 3. Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2016-2018 (Rp/Kapita/Bulan).....	15
Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Utara, 2016-2018 .....	17
Gambar 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Utara, 2016-2018.....	18
Gambar 6. Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah Sulawesi Utara, 2018 .....	19
Gambar 7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2016-2018 .....	20
Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2018 .....	21
Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2016-2018 .....	22
Gambar 10. Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2018 .....	25
Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Jamban, 2018 .....	26
Gambar 12. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Luas Lantai Per Kapita < 8 m <sup>2</sup> , 2016-2018.....	27
Gambar 13. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2018 .....	27
Gambar 14. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Miskin, 2016-2018 .....	39



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Kompleksnya permasalahan kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah serius dan penting di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan Negara berkembang.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

### 1.2 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi September 2018. Disajikan juga

data series mulai dari Maret 2016 untuk menampilkan perkembangan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan dalam berbagai analisa pada publikasi ini adalah data Susenas Kor dan Konsumsi/Pengeluaran.

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan. Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk menurut daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Utara. Bab IV membahas perbandingan tingkat kemiskinan secara nasional. Bab V membahas tentang karakteristik rumah tangga penduduk miskin, yaitu keterangan demografi dan fasilitas perumahan.

## BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN

### 2.1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

#### a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

#### b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

#### c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan

susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

#### d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp} ,$$

$GKM_{jp}$  = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

$P_{jkp}$  = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

$Q_{jkp}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

$j$  = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

$p$  = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM<sub>j</sub> tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

$K_{jkp}$  = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

$\overline{HK}_{jp}$  = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

$GKM$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

$J$  = Daerah (perkotaan/perdesaan)

$p$  = Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004. SPKKD adalah sebuah survei yang dilakukan untuk menentukan jenis-jenis komoditi dasar non-makanan. Responden dalam

survei ini adalah rumah tangga. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$  = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah  $j$  (kota/desa) dan provinsi  $p$ .

$V_{kjp}$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok nonmakanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$  (dari Susenas modul konsumsi).

$r_{kj}$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok nonmakanan  $k$  menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah  $j$  (kota+desa).

$k$  = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

$j$  = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

$p$  = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$  = % Penduduk miskin di provinsi  $p$ .

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin di provinsi  $p$ .

$P_p$  = Jumlah penduduk di provinsi  $p$ .

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

$PM_I$  = Penduduk miskin Indonesia.

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi p.

$N$  = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I} \times 100\%$$

$\%PM_I$  = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

$P_I$  = Jumlah penduduk Indonesia.

## 2.2 INDIKATOR KEMISKINAN

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

Jika  $\alpha = 0$ , diperoleh *Head Count Index* (P0), jika  $\alpha = 1$  diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan jika  $\alpha = 2$  disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

### 2.3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:



$$A = \frac{N}{X^b},$$

$A$  = jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada  $X$

$N$  = jumlah penduduk total dan

$b$  = parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran.

Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan ukuran koefisien Gini (*Gini Ratio*) untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan.

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{p_i} * (F_{c_i} + F_{c_{i-1}}),$$

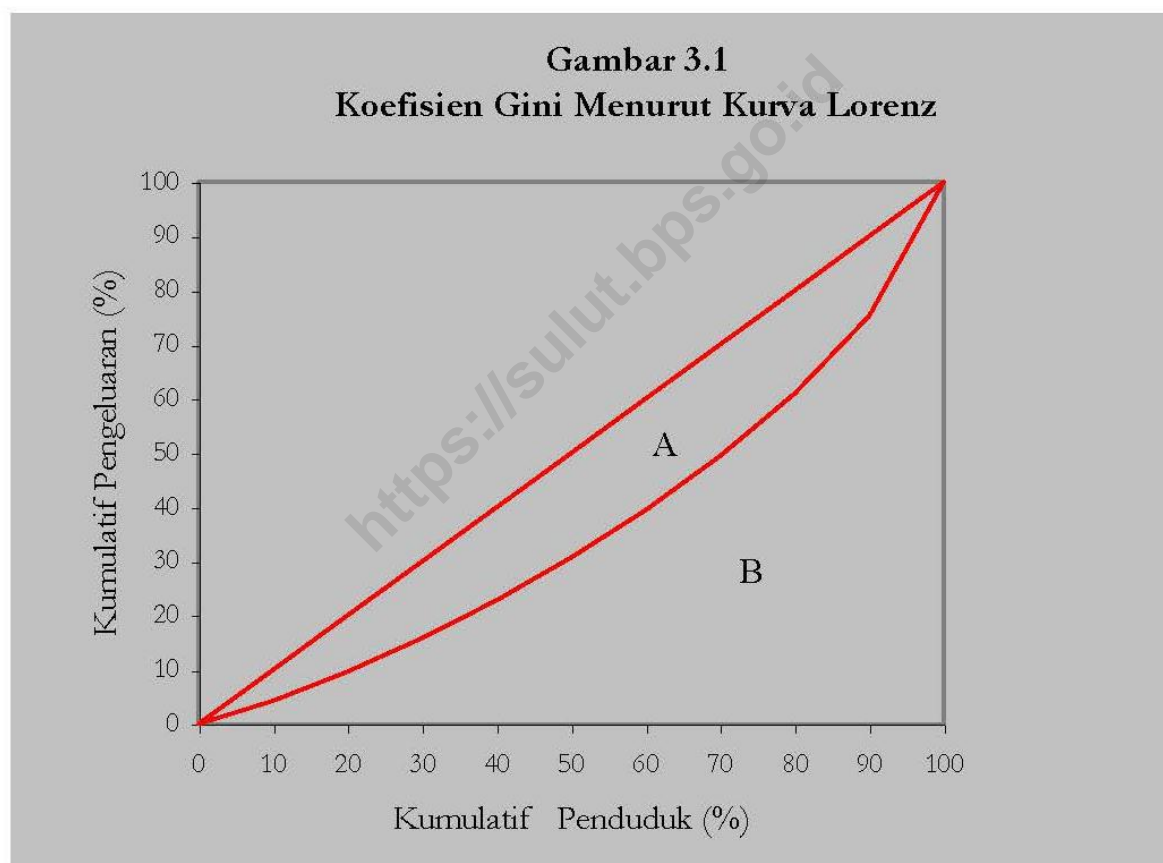
$GR$  = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

$f_{p_i}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- $i$

$F_{ci}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $i$

$F_{ci-1}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke  $(i-1)$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank. Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran

(pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai  $A/(A+B)$ , dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika  $A=0$  koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika  $B=0$  koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi. Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
- Dapat diuji secara statistik. Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

<https://sulut.bps.go.id>

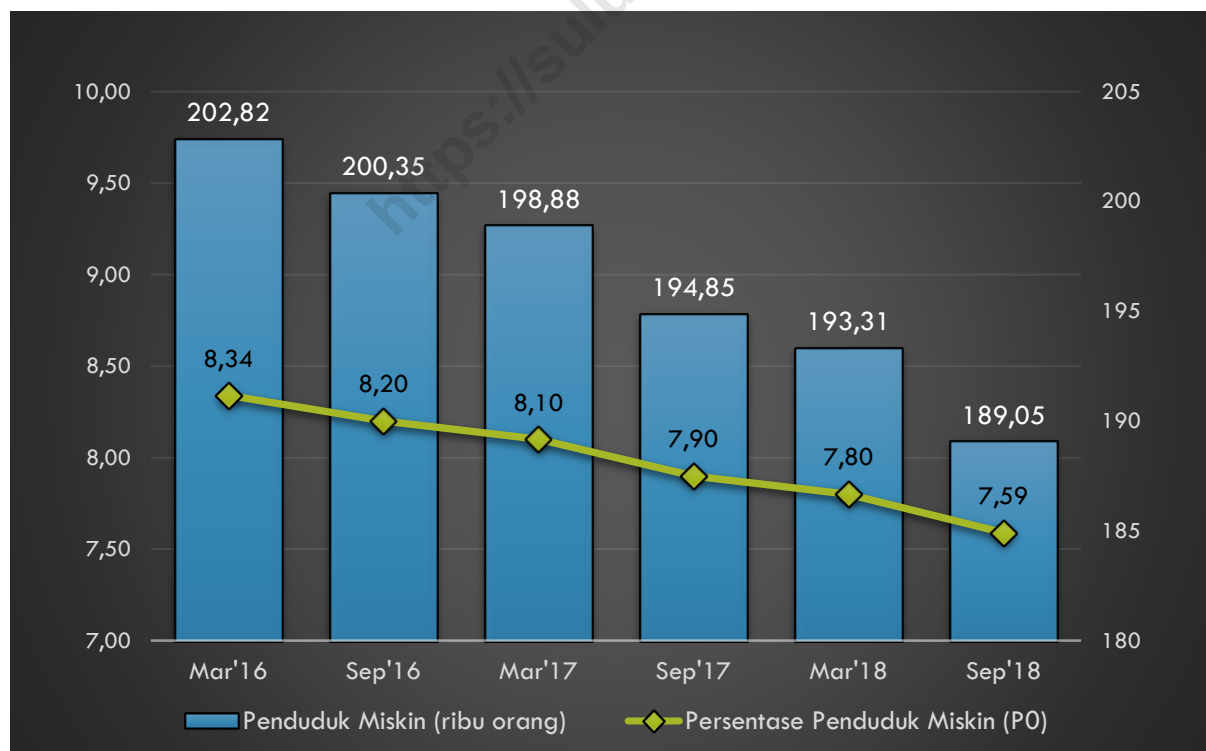
## BAB III. PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA

### 3.1 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA 2016-2018

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara pada periode 2016-2018 ditunjukkan pada Gambar 1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2016-2018 sebesar 13,770 ribu jiwa, yaitu dari 202,82 ribu jiwa pada Maret 2016 menjadi 189,05 ribu jiwa pada September 2018. Secara relative juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 8,34 persen pada Maret 2016 menjadi 7,59 persen pada September 2018.

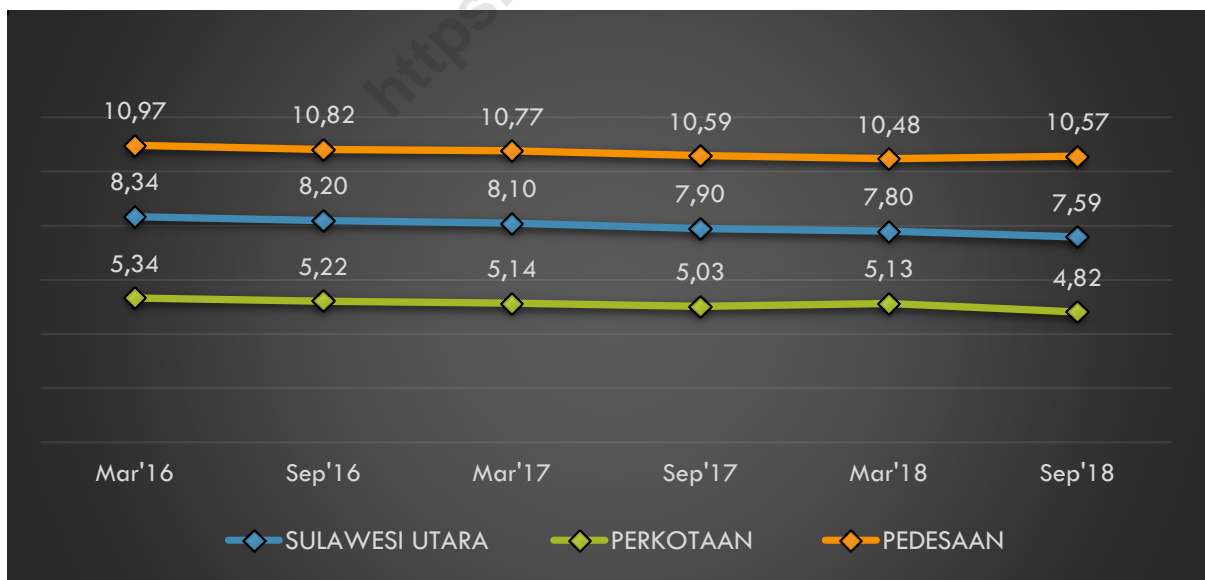
**Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Misikin Sulawesi Utara, 2016-2018**



Berdasarkan daerah atau wilayah, pada periode Maret 2016 - September 2018 tercatat tingkat kemiskinan daerah perkotaan berada pada kisaran 5,34 – 4,82 persen sedangkan tingkat kemiskinan daerah pedesaan berada pada kisaran 10,97 – 10,57 persen. Dari angka ini terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah pedesaan selalu lebih tinggi daripada daerah perkotaan.

Dalam gambar 2 juga terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara, di perkotaan, dan pedesaan memiliki pola yang hampir sama dimana persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Perbedaan hanya terjadi pada Maret 2018 dan September 2018. Pada Maret 2018 persentase penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan menjadi 5,13 persen. Sementara pada September 2018 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan menjadi 10,57 persen. Selain itu, persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan.

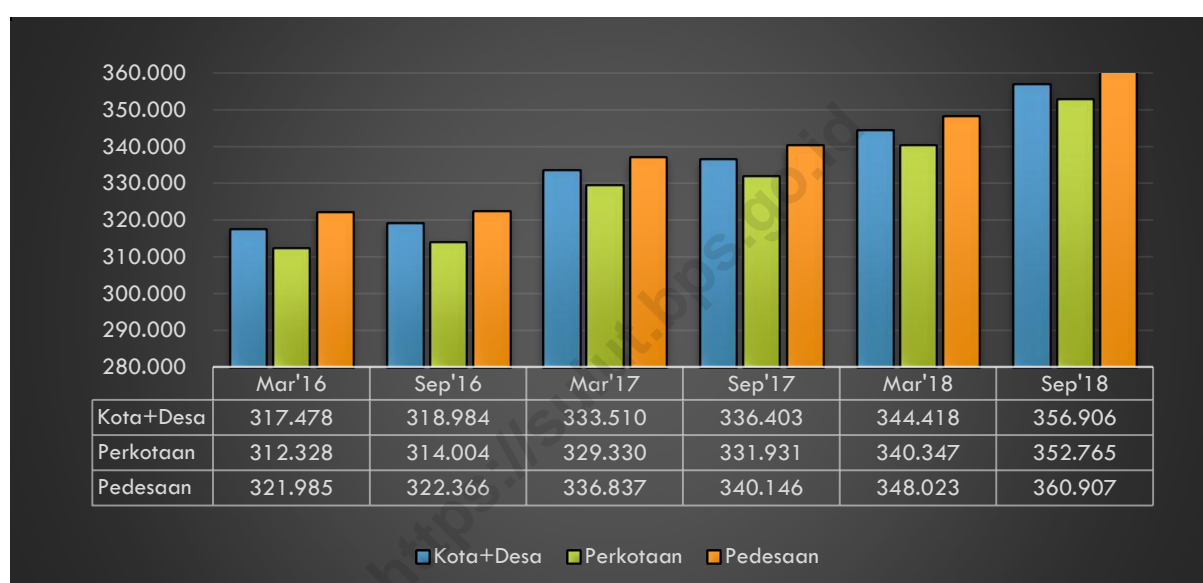
**Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2016-2018**



## 3.2 PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN

Harga-harga barang dan jasa akan terus mengalami perubahan dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu akibat inflasi. Hal ini mengakibatkan perubahan pula pada angka garis kemiskinan dari waktu ke waktu dengan kecenderungan pola yang menunjukkan kenaikan.

**Gambar 3. Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2016-2018 (Rp/Kapita/Bulan)**



Garis kemiskinan Sulawesi Utara menunjukkan tren yang naik. Pada Maret 2016 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp. 317.478,- per kapita per bulan, terus mengalami kenaikan hingga Rp. 356.906,- per kapita per bulan pada September 2018.

Garis Kemiskinan disusun perdaerah kabupaten/kota. Sehingga, jika ada penduduk miskin di suatu daerah, belum tentu penduduk tersebut merupakan penduduk miskin di daerah lain. Begitu juga sebaliknya, penduduk yang tidak miskin di suatu daerah belum tentu juga tidak miskin di daerah yang lainnya. Misalnya, jika satu penduduk dikategorikan penduduk miskin di Manado, belum tentu penduduk tersebut juga dikategorikan miskin di Bolaang Mongondow Utara.

Garis Kemiskinan Sulawesi Utara pada september 2018 sebesar Rp. 356.906,- per kapita per bulan. Artinya, jika ada satu rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak, maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin ketika pengeluaran konsumsinya kurang dari Rp. 1.427.624,- dalam sebulan. Semua orang di dalam rumah tangga tersebut dikategorikan kedalam penduduk miskin. Sebaliknya, jika rumah tangga tersebut pengeluaran konsumsinya lebih besar dari Rp. 1.427.624,- dalam sebulan, maka rumah tangga tersebut tidak dikatakan rumah tangga miskin. Semua orang di dalam rumah tangga tersebut tidak dikategorikan ke dalam penduduk miskin.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Sulawesi Utara, September**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Non Makanan	Total
<b>PERKOTAAN</b>			
September 2017	246,774	85,186	331,931
Maret 2018	253,610	86,738	340,347
September 2018	263,853	88,912	352,765
<b>PEDESAAN</b>			
September 2017	270,008	70,138	340,146
Maret 2018	276,149	71,873	348,023
September 2018	286,802	74,105	360,907
<b>PERKOTAAN + PEDESAAN</b>			
September 2017	259,010	77,393	336,403
Maret 2018	265,096	79,322	344,418
September 2018	275,123	81,783	356,906

Pengukuran garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada September 2018 GKM Sulawesi Utara sebesar Rp.

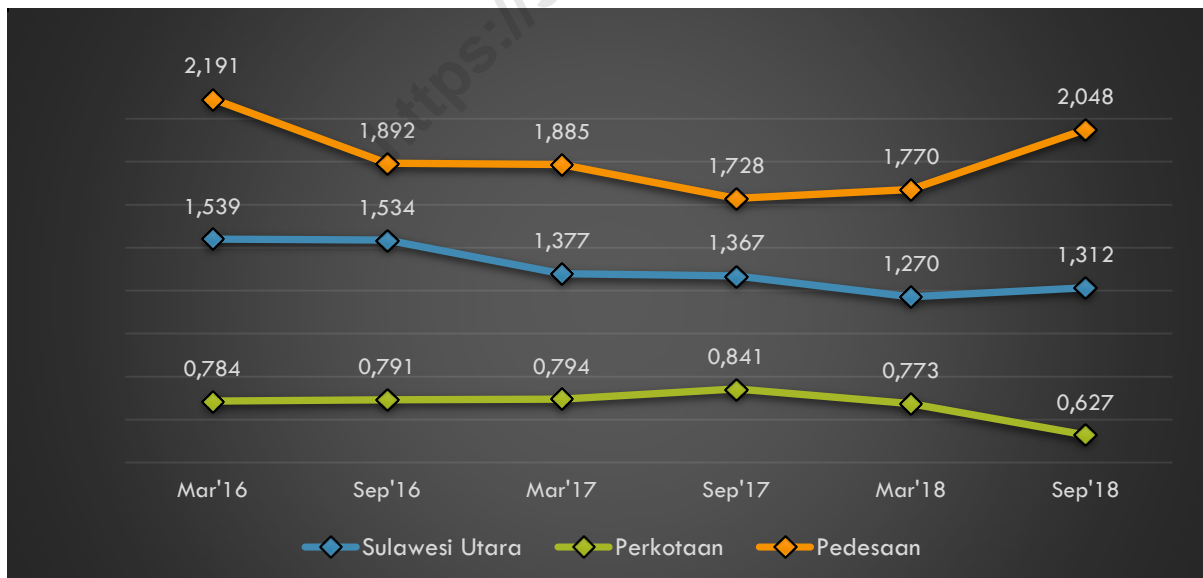


275.123,- per kapita per bulan sedangkan GKNM sebesar Rp. 81.783,- per kapita per bulan. Sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,08 persen, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan menjadi hal yang utama bagi pemenuhan kebutuhan penduduk miskin. Demikian juga dengan kondisi Maret 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 76,97 persen, masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan GKNM terhadap GK.

### 3.3 KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity*).

**Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Utara, 2016-2018**



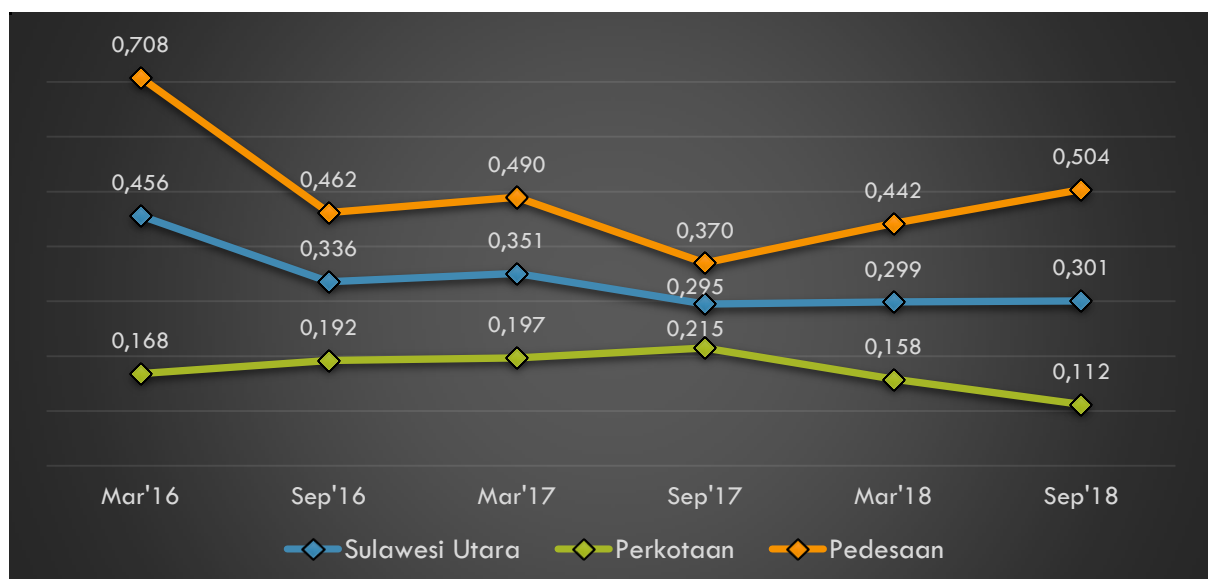
Dari tahun 2016 – 2018 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Utara berfluktuasi naik turun. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan selalu berada di bawah daerah pedesaan. Ini menggambarkan pada periode ini kondisi kemiskinan di daerah pedesaan lebih buruk dibandingkan di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan

rata-rata jarak pengeluaran perbulan penduduk miskin terhadap GK cukup lebar. Yang terlihat menarik adalah ketika angka P1 daerah perkotaan mengalami penurunan pada Maret dan September 2018 justru daerah pedesaan mengalami kenaikan. Pola ini mengindikasikan bahwa di saat penduduk miskin perkotaan semakin mampu untuk keluar dari garis kemiskinan sebaliknya penduduk miskin pedesaan malah semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Dalam 3 tahun terakhir, P1 Sulawesi Utara pada maret 2018 merupakan yang terendah. P1 Sulawesi Utara pada maret 2018 adalah sebesar 1.270. Hal tersebut berarti kondisi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin kecil angka P1 semakin mudah pula bagi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan.

Menurut penghitungan indeks keparahan kemiskinan (P2) terlihat bahwa pada tahun 2016 – 2018 angka Sulawesi Utara menunjukkan fluktuasi yang naik turun sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan. Pola yang ditunjukkan pada gambar 5 adalah daerah pedesaan selalu mengalami ketimpangan pengeluaran di Antara penduduk miskin yang lebih besar daripada perkotaan. Pola naik turun juga terjadi pada angka P2 di daerah perkotaan. Penurunan angka P2 menunjukkan jarak antar penduduk miskin semakin mengecil atau dapat juga dikatakan bahwa dari segi pengeluaran, penduduk miskin semakin homogen.

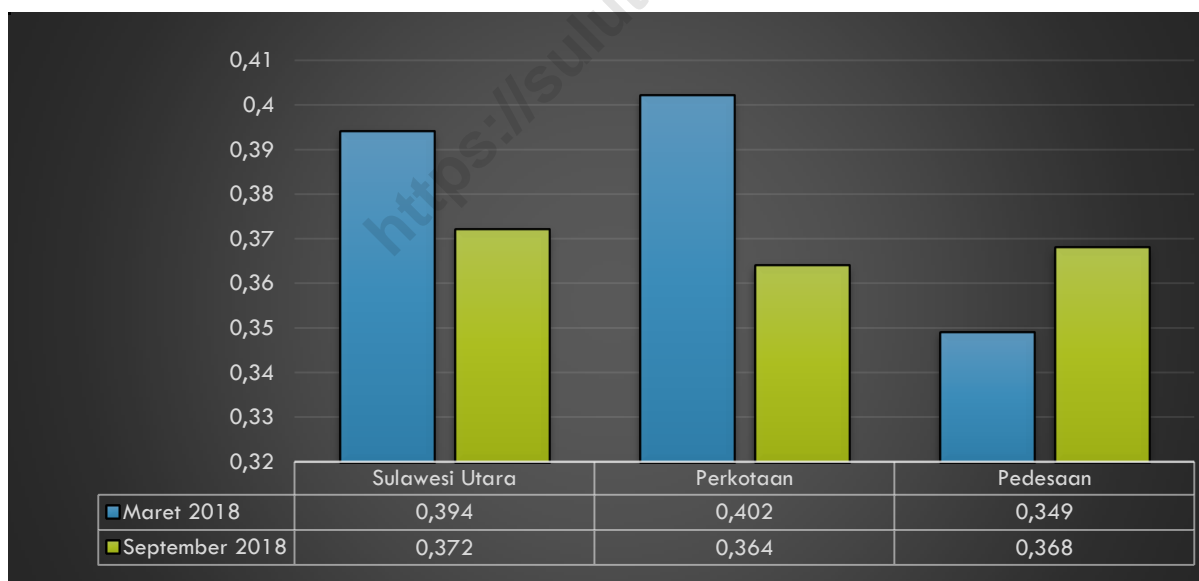
**Gambar 5. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Sulawesi Utara, 2016-2018**



### 3.4 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

Angka *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara September 2018 sebesar 0,372. Dibandingkan dengan nilai Maret 2018, *Gini Ratio* September 2018 secara total mengalami penurunan 0,022 poin. *Gini Ratio* di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,038 poin dibandingkan Maret 2018 menjadi 0,364. Sebaliknya, *Gini Ratio* di daerah pedesaan mengalami kenaikan 0,019 poin dari Maret 2018 menjadi 0,368. Artinya, ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di pedesaan semakin melebar. *Gini Ratio* Maret 2018 masih dikategorikan ke dalam kelompok ketimpangan sedang (suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika *Gini Ratio* melebihi angka 0,5).

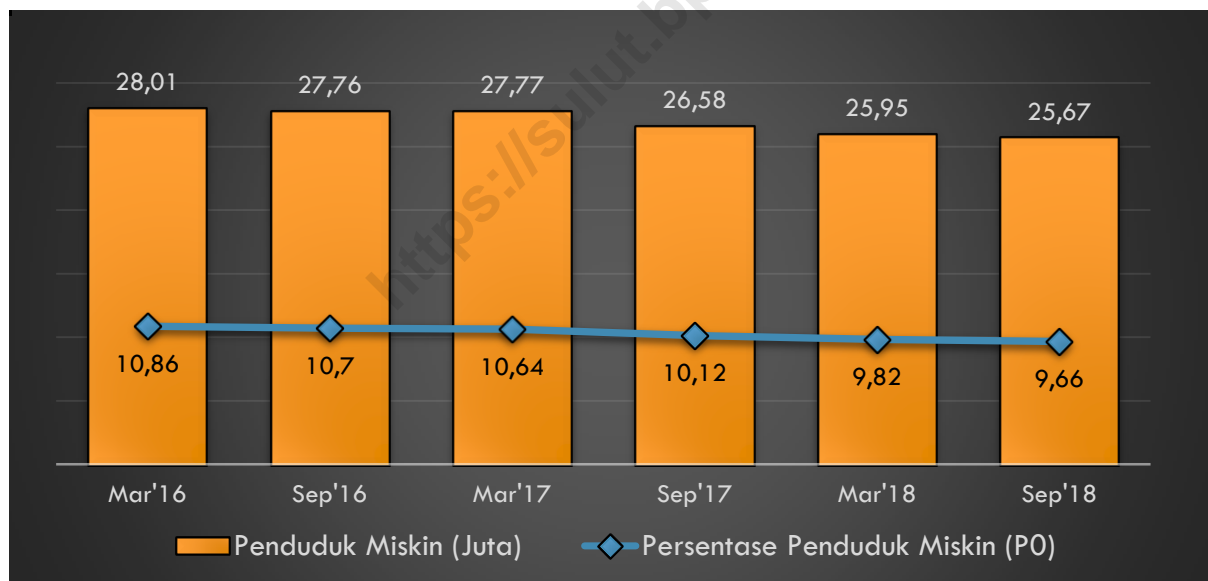
**Gambar 6. Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah Sulawesi Utara, 2018**



## BAB IV. PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA NASIONAL

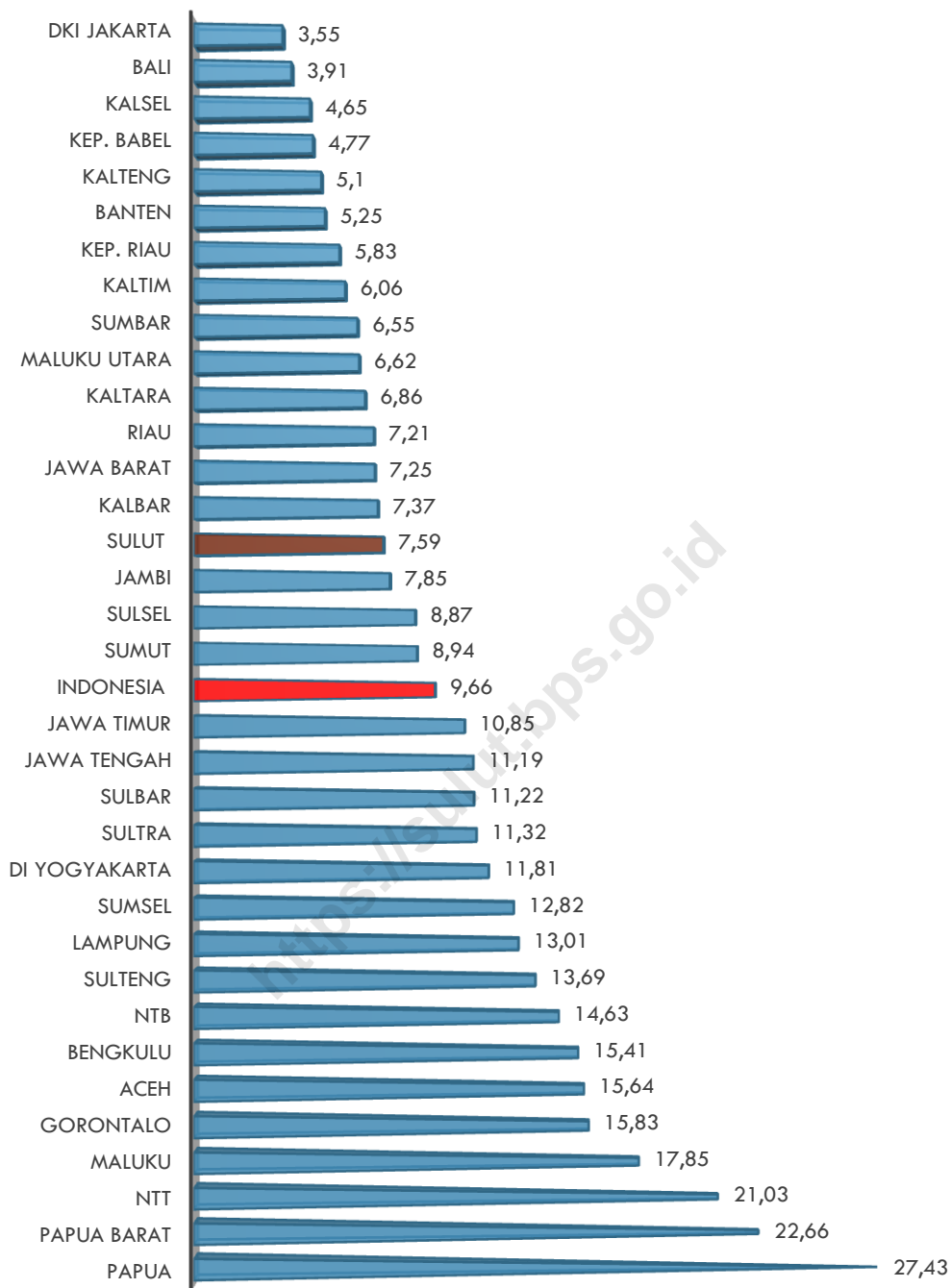
Secara umum, pada periode Maret 2016–September 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang. Dibandingkan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun 275,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2017 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 908,4 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2018 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan September 2018 disajikan pada Gambar 7.

**Gambar 7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2016-2018**



Secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi terendah ke-15 setelah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bali dan DKI Jakarta.

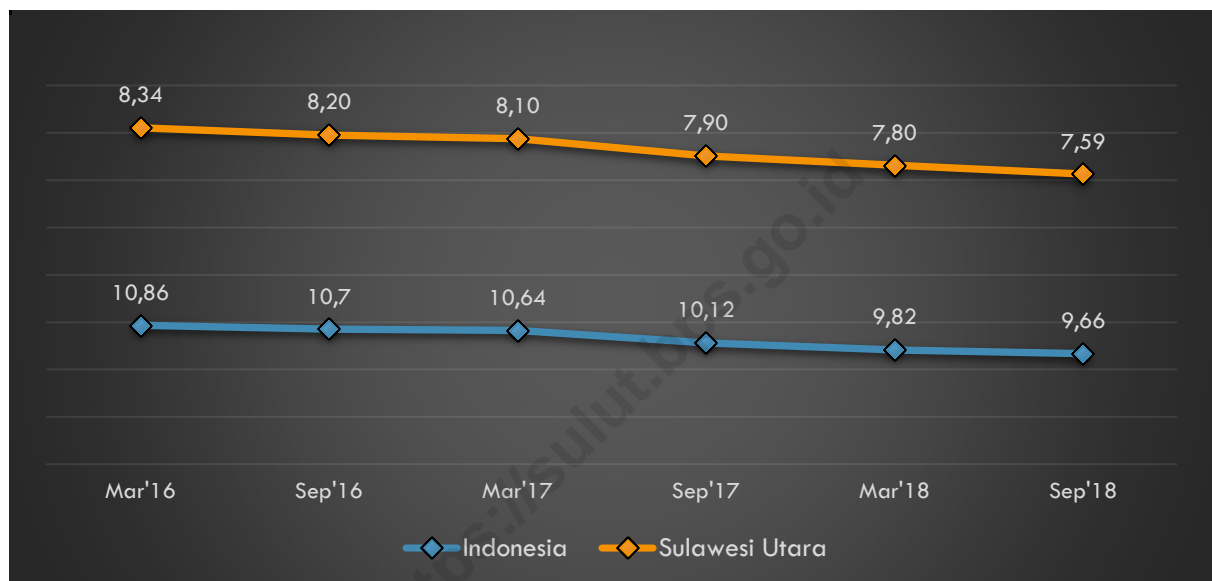
**Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2018**



Ketika membandingkan dengan provinsi – provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tampak bahwa Sulawesi Utara berada pada posisi terendah tingkat kemiskinannya. Sementara di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Sulawesi Utara berada di peringkat kedua terendah setelah Maluku Utara.

Dilihat dari persentase penduduk miskin menurut provinsi tampak bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Utara pada periode September 2018 sebesar 7,59 persen, sementara persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,66 persen. Hal ini menempatkan posisi tingkat kemiskinan Sulawesi Utara berada di bawah angka Nasional. Menengok ke belakang ke tahun 2016 hingga 2018, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara juga selalu berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia.

**Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2016-2018**



## BAB V. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN SULAWESI UTARA

Berbicara mengenai masalah kemiskinan tentu akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengeluaran perkapita per bulan. Dengan mengetahui gambaran karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

### 5.1 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

#### Rumah Tangga Miskin Memiliki Anggota Rumah Tangga yang Lebih Banyak

Rumah tangga miskin di Sulawesi Utara mempunyai rata-rata anggota rumah tangga lebih banyak dari rumah tangga tidak miskin. Pada periode 2017-2018 rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di Sulawesi Utara sebanyak 5-6 anggota rumah tangga. Sementara pada rumah tangga tidak miskin sebanyak 3-4 anggota rumah tangga.

**Tabel 2. Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga di Sulawesi Utara, 2017-2018**

Karakteristik Rumah Tangga	Miskin		Tidak Miskin	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Rata-rata jumlah anggota rumah tangga</b>				
- Perkotaan	5.26	5.80	3.76	3.75
- Perdesaan	5.20	5.04	3.74	3.72
- Perkotaan+Perdesaan	5.22	5.26	3.75	3.74

#### Rumah Tangga Miskin yang dikepalai oleh Perempuan Meningkat

Hal yang melatar belakangi wanita menjadi seorang kepala rumah tangga bisa disebabkan karena wanita ini belum pernah menikah dan mendirikan rumah tangga sendiri atau mengambil alih tanggung jawab kepala keluarga dimana ia menjadi anggota, faktor

perceraian, ataupun suami tidak dapat mencari nafkah lagi sehingga istri menggantikan posisinya mencari nafkah.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan di Sulawesi Utara tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan pada tahun 2018 di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 11,80 persen.

**Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan di Sulawesi Utara, 2017-2018**

Karakteristik Rumah Tangga (1)	Miskin	
	2017 (2)	2018 (3)
<b>Persentase perempuan sebagai KRT</b>		
- Perkotaan	4.03	7.55
- Perdesaan	9.72	13.62
- Perkotaan+Perdesaan	8.02	11.80

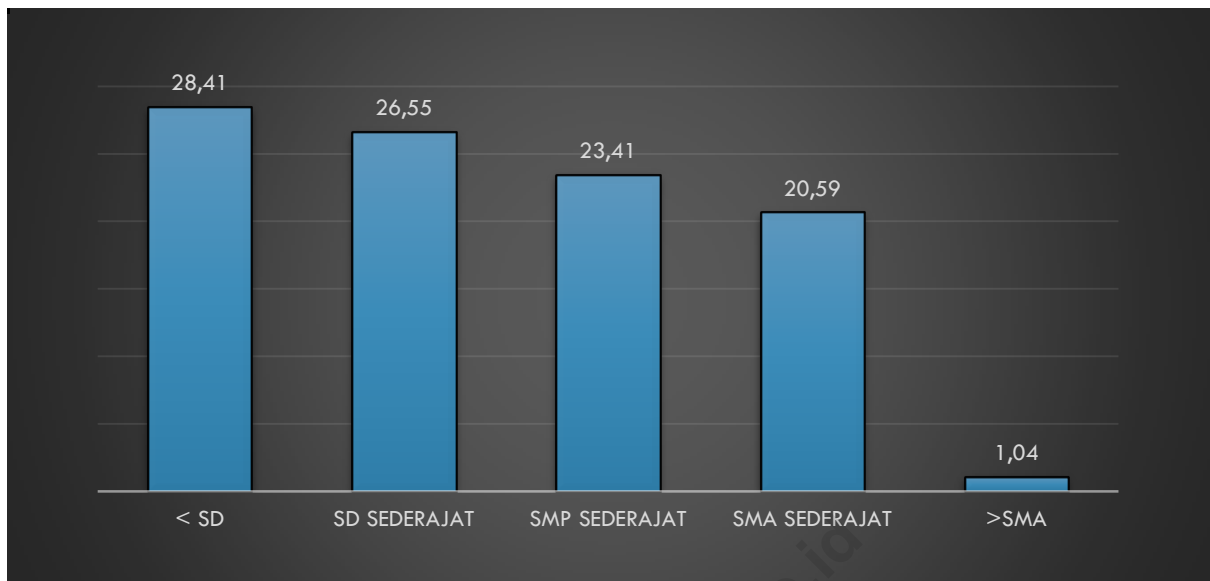
## 5.2 KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

### **Pendidikan Tertinggi Sebagian Besar Penduduk Miskin adalah Tidak Tamat SD**

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Pada tahun 2018, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang tidak tamat SD yaitu sebesar 28,41 persen. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara semakin kecil sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan.



**Gambar 10. Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2018**

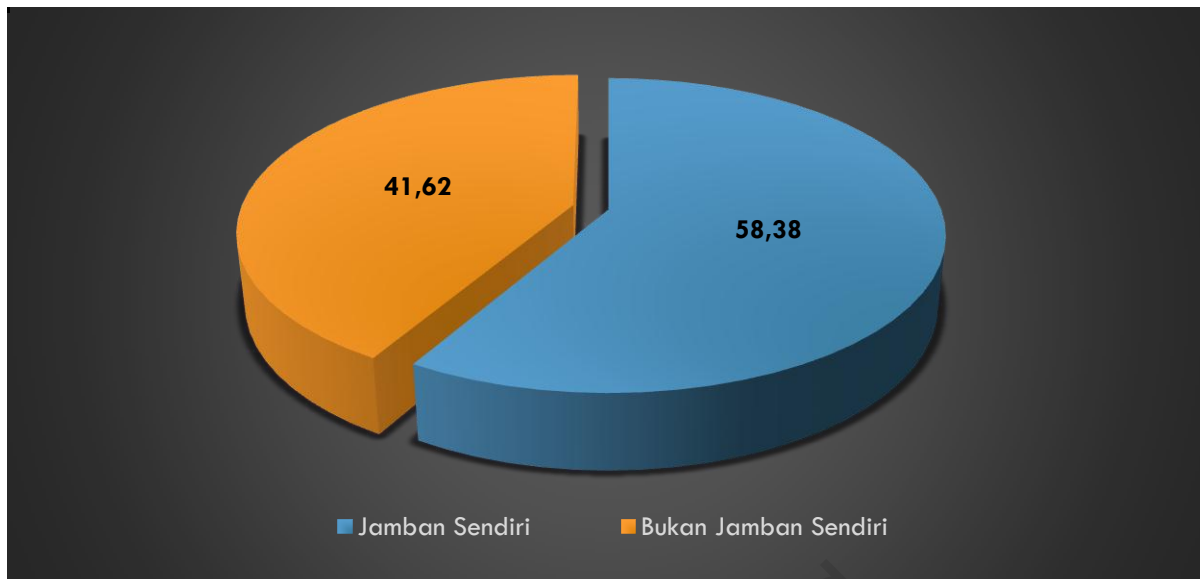


### 5.3 KARAKTERISTIK PERUMAHAN

#### **Sebanyak 41,38 Persen Rumah Tangga Miskin Tidak Menggunakan Jamban Sendiri**

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga miskin di Sulawesi Utara tahun 2018 yang menggunakan jamban sendiri sebesar 58,38 %. Sementara persentase rumah tangga miskin di Sulawesi Utara yang menggunakan jamban bersama/komunal maupun yang tidak ada sebesar 41,62 persen.

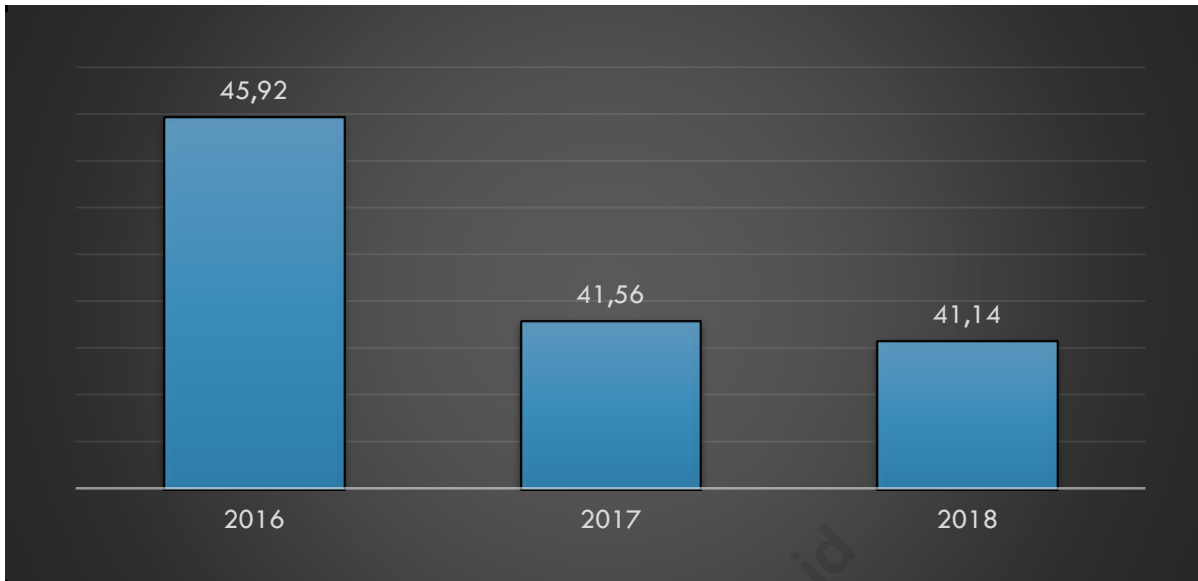
**Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Jamban, 2018**



**Rumah Tangga Miskin yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Kapita Kurang dari 8 m<sup>2</sup> Sebesar 41,14 Persen**

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m<sup>2</sup>). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup>. Pada periode 2016–2018, persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal  $\leq 8$  m<sup>2</sup> cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 45,92 persen pada tahun 2016 menjadi 41,14 persen pada tahun 2018.

**Gambar 12. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Luas Lantai Per Kapita <math><8\text{m}^2</math>, 2016-2018**

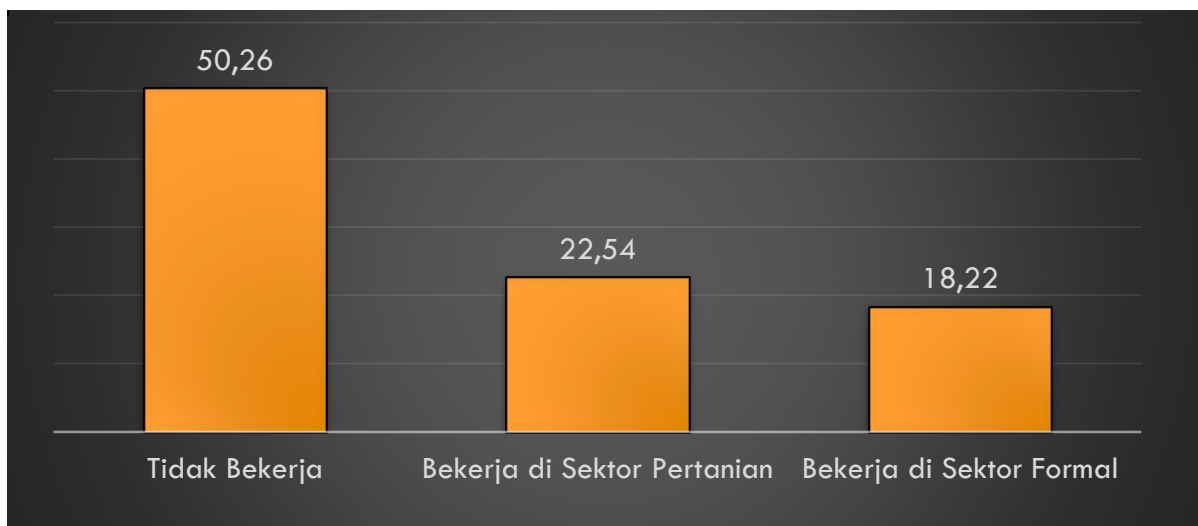


#### 5.4 KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN

##### Lebih dari 50 persen, Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Tidak Bekerja

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) sebesar 50,26 persen.

**Gambar 13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2018**



### **Pada Umumnya Penduduk Miskin Menggantungkan Hidupnya dari Sektor Pertanian**

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Pada tahun 2018, ada sebesar 22,55 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

### **Sebagian Besar Penduduk Miskin Berstatus sebagai Pekerja Informal**

Ditinjau dari status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk miskin berstatus sebagai pekerja informal (yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada tahun 2018 tercatat bahwa penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas di Sulawesi Utara yang bekerja di sektor informal yaitu sebesar 31,52 persen.

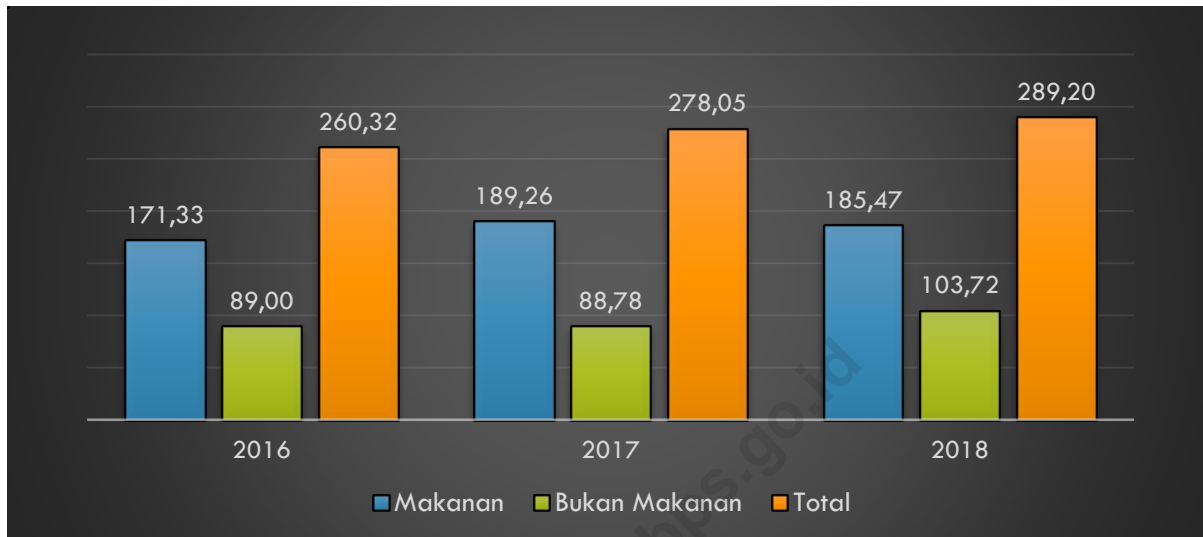
## **5.5 PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN**

### **Sebagian Besar Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Pada Rumah Tangga Miskin Untuk Komoditi Makanan**

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan adalah untuk membiayai komoditi makanan. Pada Maret

2018 pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga miskin di Sulawesi Utara untuk komoditi makanan yaitu sebesar Rp185.472. Pengeluaran tersebut dari tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan.

**Gambar 14. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Miskin, 2016-2018**



## BAB VI. LAMPIRAN

Tabel 4. Kondisi Kemiskinan di Sulawesi Utara, Maret 2016-September 2018

		Mar'16	Sep'16	Mar'17	Sep'17	Mar'18	Sep'18
JUMLAH	SULAWESI UTARA	202.82	200.35	198.88	194.85	193.31	189.05
PERSENTASE	SULAWESI UTARA	8.34	8.20	8.10	7.90	7.80	7.59
	PERKOTAAN	5.34	5.22	5.14	5.03	5.13	4.82
	PERDESAAN	10.97	10.82	10.77	10.59	10.48	10.57
KEDALAMAN	SULAWESI UTARA	1.539	1.534	1.377	1.367	1.270	1.312
	PERKOTAAN	0.784	0.791	0.794	0.841	0.773	0.627
	PERDESAAN	2.191	1.892	1.885	1.728	1.770	2.048
KEPARAHAN	SULAWESI UTARA	0.456	0.336	0.351	0.295	0.299	0.301
	PERKOTAAN	0.168	0.192	0.197	0.215	0.158	0.112
	PERDESAAN	0.708	0.462	0.490	0.370	0.442	0.504
GARIS KEMISKINAN	SULAWESI UTARA	317,478	318,984	333,510	336,403	344,418	356,906
	PERKOTAAN	312,328	314,004	329,330	331,931	340,347	352,765
	PERDESAAN	321,985	322,366	336,837	340,146	348,023	360,907

Tabel 5. Gini Ratio Sulawesi Utara, 2018

	Mar'18	Sep'18
SULAWESI UTARA	0.394	0.372
PERKOTAAN	0.402	0.364
PERDESAAN	0.349	0.368

Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Umur 15+ Menurut Ijazah, 2018

TDK PUNYA IJAZAH	SD SEDERAJAT	SMP SEDERAJAT	SMA SEDERAJAT	DIPLOMA/SARJANA	S2/S3	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.41	26.55	23.41	20.59	1.04	.00	100.00

Table 7. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Umur 15+ Menurut Sektor Pekerjaan, 2018

PERTANIAN			
TIDAK BEKERJA	SEK. PERTANIAN	SEK NON PERTANIAN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)

50.256	22.54	27.199	100.00
--------	-------	--------	--------

FORMAL			
TIDAK BEKERJA	SEK. FORMAL	SEK NON FORMAL	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
50.256	18.22	31.524	100.00

Tabel 8. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2016-2018

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2016	171.33	89.00	260.32
2017	189.26	88.78	278.05
2018	185.47	103.72	289.20

Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Miskin Sulawesi Utara Menurut Keberadaan Fasilitas BAB, 2016-2018

Tahun	Ada, digunakan ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART RT tertentu	Ada, di MCK umum	Ada, ART tidak menggunakan	Tidak ada	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	56.92	13.89	8.17	0.00	21.02	100.00
2017	55.48	9.89	4.72	0.00	29.90	100.00
2018	58.38	11.56	7.43	0.81	21.83	100.00



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Jl. 17 Agustus Manado  
Homepage: [sulut.bps.go.id](http://sulut.bps.go.id)  
Email: [bps7100@bps.go.id](mailto:bps7100@bps.go.id)

